



LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**Disampaikan pada
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47
MAKASSAR
16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M**

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Konsolidasi Organisasi	6
III. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Organisasi dan Jaringan	19
IV. Peneguhan ideologi, Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Anggota dan Kader	24
V. Peningkatan dan Pengembangan Amal Usaha, Praksis Sosial dan Kegiatan Majelis / Lembaga	29
VI. Peningkatan dan Pengembangan Peran Strategis Muhammadiyah	43
VII. Keuangan.....	51
VIII. Problematika Gerakan Muhammadiyah.....	55

Lampiran:

1. Laporan Tim Verifikasi Keuangan	61
2. Laporan Majelis (Buku tersendiri)	
3. Laporan Lembaga (Buku tersendiri)	
4. Laporan Organisasi Otonom (Buku tersendiri)	

**LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
DALAM MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47
DI MAKASSAR
TAHUN 1436 H / 2015 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه المبين وفصل آياته بسنة نبيه الامين. أشهد ان لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد ان محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم علي محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين. أما بعد.

I. PENDAHULUAN

Sebagai pembuktian kesadaran tauhid dan penandasan rasa syukur, maka kita lafalkan tahlil dan tahmid dengan khusyu` dan tawadhu` ke Hadirat Allah Subhanahu wa-Ta`ala. Atas berkah, `inayah, dan hidayah-Nya pula Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menyelenggarakan Mukhtamar ke-47 di Makassar yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H/03-07 Agustus 2015 M.

Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar ini merupakan fase baru Muhammadiyah memasuki periode awal abad kedua perjuangannya. Memasuki abad kedua setelah kelahirannya Muhammadiyah mengalami tantangan internal dan eksternal yang kompleks dan dinamis, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan prinsip gerakan yang kokoh, paham Islam yang berkemajuan, kekuatan jaringan, soliditas organisasi, kekuatan sumber daya manusia, dan modal sosial yang dimilikinya Muhammadiyah mampu mempertahankan eksistensi dan peranannya dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global di era baru saat ini. Bahkan Muhammadiyah dalam level tertentu mampu mengubah tantangan menjadi peluang seperti dalam kehidupan politik kebangsaan, dengan mengalihkan energi dan kemampuan untuk membangun kemandirian dan melakukan peran jihad konstitusi yang memperoleh apresiasi luas. Hal ini dapat dilihat pula dari peran Muhammadiyah dalam melayani masyarakat dan mengembangkan organisasi dan gerakannya tidak hanya pada level nasional tapi juga internasional.

Muhammadiyah mampu menampilkan dirinya sebagai organisasi dan gerakan Islam yang memandu keagamaan umat, memberdayakan masyarakat, menguatkan masyarakat madani, dan mengarahkan kiblat bangsa. Sesuai dengan jati dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahyi munkar, Muhammadiyah senantiasa hadir untuk, bersama-sama dengan elemen bangsa yang lainnya, menyelamatkan masa depan kehidupan umat dan bangsa. Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan tersebut Muhammadiyah antara lain melakukan *judicial review* atas Undang-undang Migas, Undang-undang Rumah Sakit, Undang-undang Ormas, dan Undang-undang Sumber Daya Air yang dikenal dengan gerakan jihad konstitusi. Muhammadiyah juga memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis yaitu antara lain pertama masalah politik kebangsaan meliputi kedaulatan dan martabat bangsa, kritik kebijakan publik, dan kondisi politik nasional lainnya dari sudut moral kebangsaan, serta yang kedua

soal relasi umat beragama. Sejumlah Pernyataan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipublikasikan sebagai wujud komitmen dakwah kebangsaan.

Melalui amal usaha, program majelis, lembaga, biro, dan badannya, Muhammadiyah tiada henti berkiprah mengembangkan model-model gerakan dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Muhammadiyah tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul dan berprestasi baik di dalam maupun di luar negeri serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan di luar negeri. Sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ternama telah mengangkat marwah Muhammadiyah di pentas nasional dan internasional, sekaligus menjadi penanda *center of excellence* (uswah hasanah) dan *driving force* (kekatan penggerak) kemajuan Persyarikatan. Perguruan Tinggi baru lahir, sebagian sedang memproses diri menjadi Universitas. 'Aisyiyah yang memiliki 16 perguruan tinggi juga menunjukkan gelora dan dinamika yang membanggakan dan kini sedang memproses perubahan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta menuju sebuah Universitas 'Aisyiyah. 'Aisyiyah selaku Ortom Khusus dalam lima tahun terakhir ini kian menunjukkan dinamika yang membanggakan, baik dalam mengembangkan amal usaha lebih-lebih dalam gerakannya di akar-rumpun atau basis komunitas bawah.

Perkembangan usaha kesehatan dan pelayanan sosial juga menggembirakan. Rumah sakit dan klinik Muhammadiyah terus meningkat kualitasnya dan meningkatkan pelayanannya sehingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Muhammadiyah tidak hanya mengasuh dan membina anak yatim, anak terlantar, anak jalanan, dan manula yang berbasis panti asuhan tetapi juga berbasis keluarga. Keberpihakan Muhammadiyah kepada kaum duafa dan mustad'afin (petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan kaum difabel) diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan melalui kelompok-kelompok binaan.

Usaha-usaha di bidang ekonomi semakin dirasakan manfaatnya dengan pembinaan UMKM termasuk mini market, pengembangan jejaring Baitut Tamwil Muhammadiyah, pemanfaatan lahan wakaf, serta kerjasama dengan perusahaan dan lembaga keuangan di dalam maupun luar negeri. Kiprah yang menonjol juga ditunjukkan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan bencana. MDMC kiprahnya semakin diakui, antara lain karena memiliki program yang integratif dan komprehensif bukan hanya memberi pertolongan jangka pendek, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pasca bencana yang melibatkan bidang lainnya. Peningkatan kinerja Lazismu menjadi penopang penting bagi keberhasilan program pengembangan masyarakat dan penanggulangan bencana Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid secara intensif terus melakukan penyegaran dan pengembangan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan sejumlah terobosan dengan menyusun Tafsir At-Tanwir, Fikih Tatakelola, Fikih Al-Ma'un, Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan lain-lain. Pembinaan mubaligh dan jamaah terus ditingkatkan oleh Majlis Tabligh. Pembinaan ideologi dan nilai nilai gerakan bagi kader, pimpinan, dan pengelola AUM semakin digencarkan oleh Majelis Pendidikan Kader.

Usaha untuk eksis di udara dan di dunia maya terus diupayakan dan semakin nampak hasilnya. Kehadiran TVMu, RadioMu, dan ratusan website Muhammadiyah yang dikelola pimpinan, AUM, kader dan anggota Muhammadiyah cukup mewarnai. Demikian juga dengan media cetak dan penerbitan terus berkembang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, meski harus terus memperoleh dukungan kuat dari seluruh warga dan amal usaha Pesyarkatan. Majalah Suara Muhammadiyah, Suara 'Aisyiyah, Majalah Tabligh, Majalah al Manar, dan beberapa media yang diterbitkan oleh PWM, PDM dan AUM juga mengalami peningkatan tirasnya.

Kegiatan seni budaya juga terus semakin bangkit dan bergeliat, terlebih setelah Majelis Tarjih memutuskan hukum dan tuntunan berkesenian. Ke depan upaya untuk melahirkan seniman dan budayawan Muhammadiyah harus semakin digencarkan. Sedangkan kepercayaan masyarakat untuk wakaf kepada Muhammadiyah alhamdulillah sampai saat ini masih sangat tinggi. Kerja keras dan usaha maksimal yang dilakukan oleh Majelis wakaf ternyata belum cukup untuk mengamankan aset persyarikatan dengan pensertifikatan. Masih banyak aset Muhammadiyah yang belum bersertifikat. Bahkan beberapa sudah berbuah kasus sengketa.

Pengembangan basis gerakan Muhammadiyah dilakukan dengan penguatan cabang dan ranting yang sudah ada serta pembentukan cabang dan ranting baru. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting selalu berusaha memecahkan kebekuan di basis gerakan tersebut, sambil terus berusaha untuk menerobos ke daerah-daerah potensial untuk memperluas jangkauan basis gerakan yang baru. Peta Cabang dan Ranting secara nasional dan perwilayah disusun dengan cukup lengkap sebagai data dasar, yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Berbagai buku pedoman dan tuntunan yang menyangkut pengembangan Cabang dan Ranting diintensifkan, bahkan LPCR termasuk cukup produktif dalam menyusun buku-buku panduan tersebut.

Dalam lima tahun terakhir Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga terus membangun opini pemikiran keislaman di tingkat nasional maupun internasional dengan mempublikasikan pandangan Islam Berkemajuan, Gerakan Pencerahan, dan Indonesia Berkemajuan. Dalam menyongsong Muktamar ke-47 dalam koordinasi Panitia Pengarah, bahkan telah diselenggarakan 18 Seminar Nasional di sejumlah PTM dan Amal Usaha lain dengan mengangkat berbagai isu strategis dalam cakupan tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” sebagaimana menjadi tema utama Muktamar. Publikasi dan dialog di ruang publik tersebut dimaksudkan untuk membangun tafsir dan konstruksi kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal berdasarkan

pandangan-pandangan Muhammadiyah yang mengedepankan ide, konsep, dan pemikiran-pemikiran berkemajuan dalam perspektif Islam Berkemajuan yang selama ini diyakini, dipahami, dan dipraktikkan Muhammadiyah.

II. KONSOLIDASI ORGANISASI

Setelah 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih dalam Muktamar ke-46 maka langkah pertama yang diambil oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyusun formasi kepemimpinan secara lengkap untuk efisiensi dan efektifitas kepemimpinan. Formasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 153/KEP/I.O/D/2010 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
Ketua : Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Ketua : Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Ketua : Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A.
Ketua : Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.
Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.
Ketua : Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni
Ketua : Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A.
Ketua : Drs. H. M. Goodwill Zubir
Ketua : Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA
Ketua : Drs. H. M. Sukriyanto, AR., M.Hum.
Ketua : Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
Ketua : Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.

Sekretaris Umum: Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
Sekretaris : Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

Bendahara Umum: Prof. Dr. H. Zamroni
Bendahara : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Untuk melaksanakan program Muktamar Muhammadiyah ke-46, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Majelis, Lembaga dan Biro sebagai Unsur Pembantu Pimpinan. Adapun Majelis, Lembaga, dan Biro tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid (Ketua Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.)
2. Majelis Tabligh (Ketua dr. H. Agus Sukaca, M.Kes.)
3. Majelis Pendidikan Tinggi (Ketua Dr. H. Chairil Anwar, M.A.)
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Ketua Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si.)
5. Majelis Pendidikan Kader (Ketua H. Asep Purnama Bahtiar, M.Si.)
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum (Ketua Dr. Lukman Ali Husin, Sp. PD)
7. Majelis Pelayanan Sosial (Ketua Ir. Sularno, M.Si.)
8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (Ketua Syafrudin Anhar, SE., M.M.)
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (Ketua Drs. H. Irsyadul Halim)
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Ketua Dr. (HC). H. Said Tuhuleley, M.M.)
11. Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia (Ketua Dr. Chairul Huda, SH., M.H.)
12. Majelis Lingkungan Hidup (Ketua Prof. Dr. H. Muhjidin Mawardi, M.Eng.)
13. Majelis Pustaka dan Informasi (Ketua Dr. H. Muchlas, M.T.)
14. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (Ketua Dr. phil. Ahmad Norma Permata, M.A.)
15. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (Ketua H. Baridjussalam Hadi, S.E., M.A.)
16. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Ketua M. Riefqi Muna, PhD, MDef.Stu.)
17. Lembaga Penanggulangan Bencana (Ketua H. Budi Setiawan, ST.)

18. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ketua Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.)
19. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (Ketua Drs. H. Imam Addaruqutni, M.A.)
20. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (Ketua Drs. Jabrohim, M.M.)
21. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (Ketua Dr. H. Rizal Sukma)
22. Biro Organisasi (Ketua Dr. Ulung Pribadi, M.Si.)

Untuk dapat melaksanakan amanat Mukhtamar serta men-sinergikan seluruh sumberdaya Persyarikatan dan mengoordinasikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Unsur Pembantu Pimpinan, maka disusunlah pembagian tugas dan tata kerja bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sebuah pedoman. Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat ini secara formal dirumuskan dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tanggal 11 Ramadhan 1431 H / 21 Agustus 2010 M.

Pimpinan Pusat merupakan kesatuan yang bulat dan tersistem dalam organisasi. Pembagian tugas dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu setiap anggota Pimpinan Pusat dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan dan memelihara hubungan, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara terus-menerus. Setiap anggota Pimpinan Pusat menjalankan tugas dan kewajiban organisasi--sesuai dengan bidang dan bagian yang telah ditentukan--sebagai berikut:

1. Ketua Umum (Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.)
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan Persyarikatan.
 - c. Mengkoordinasikan anggota Pimpinan Pusat lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing

- d. Melakukan peran-peran strategis keumatan – kebangsaan dan kemanusiaan sesuai prinsip dan kepentingan Persyarikatan serta melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/warga Persyarikatan.
 - e. Mewakili Pimpinan Pusat kedalam dan keluar Persyarikatan, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - g. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional.
2. Ketua (Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Litbang.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/warga Persyarikatan.
 - d. Membantu Ketua Umum dalam Memimpin Rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - Majelis Pendidikan Tinggi
 - Majelis Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren
 - Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 3. Ketua (Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Konsolidasi Ideologis, Kelembagaan, dan Pemberdayaan Anggota.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/warga Persyarikatan.
 - d. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat

- e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.
4. Ketua (Drs. H. Muhammad Muqaddas, Lc., M.A.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Tabligh.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Majelis Tabligh.
 5. Ketua (Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Perkaderan dan Pembinaan Organisasi Otonom.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan konsolidasi Wilayah dan pembinaan Organisasi Otonom Muhammadiyah.
 - e. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Majelis Pendidikan Kader.
 6. Ketua (Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.Ag.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Majelis Tarjih dan Tajdid.

7. Ketua (Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, MA.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - Majelis Pembina Kesehatan Umum
 - Majelis Pelayanan Sosial
 - Lembaga Penanggulangan Bencana
8. Ketua (Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - Majelis Hukum dan HAM
 - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
9. Ketua (Drs. H. M. Goodwill Zubir)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Wakaf dan Kehartabendaan.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

10. Ketua (Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Ekonomi, ZIS, dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 - Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 - Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah
11. Ketua (Drs. H. Sukriyanto AR., M.Hum.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Lingkungan Hidup, Seni Budaya, dan Olahraga.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - Majelis Lingkungan Hidup
 - Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
12. Ketua (Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Bidang Pustaka dan Informasi.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Unsur Pembantu Pimpinan: Majelis Pustaka dan Informasi.

13. Ketua (Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si / ex officio Ketua Umum PP 'Aisyiah)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat.
14. Sekretaris Umum (Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Persyarikatan.
 - c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.
 - d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - e. Membantu Ketua Umum/Ketua dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan Pusat khususnya ketika mereka berhalangan.
 - f. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat.
 - g. Mengkordinasikan kegiatan Sekretariat yang dilakukan oleh Unsur Pembantu Pimpinan.
 - h. Membina dan mengkordinasikan:
 - Biro Organisasi
 - Biro Perencanaan dan Pengendalian Program
 - i. Memimpin dan menyelenggarakan penerbitan Berita Resmi Muhammadiyah.
15. Sekretaris, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.

- b. Membantu Sekretaris Umum dalam mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Persyarikatan.
 - c. Membantu Sekretaris Umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat Kantor Jakarta.
16. Sekretaris Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Sekretaris Umum dalam mengendalikan informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Persyarikatan
 - c. Membantu Sekretaris Umum dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai kepada penyiapan tanfidznya.
 - d. Membantu Sekretaris Umum dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapat-rapat Pimpinan Pusat.
 - e. Membantu Sekretaris Umum dalam memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat Kantor Yogyakarta.
 - f. Membantu Sekretaris Umum dalam membina dan mengkoordinasikan Biro Organisasi, Biro Perencanaan dan Pengendalian Program, serta penyelenggaraan penerbitan Berita Resmi Muhammadiyah.

17. Bendahara Umum (Prof. Dr. H. Zamroni, M.Sc.)
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan Persyarikatan.
 - c. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Pimpinan Pusat.
 - d. Mengkordinasikan usaha penggalan dana.
 - e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Pimpinan Pusat.
 - f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Pimpinan Pusat
 - g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan Pusat.
 - h. Membina Biro Keuangan dan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan.
18. Bendahara, Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan Pimpinan Pusat.
 - c. Membantu Bendahara Umum dalam mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Pimpinan Pusat.
 - d. Membantu Bendahara Umum dalam mengkordinasikan usaha penggalan dana.
 - e. Membantu Bendahara Umum dalam mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Pimpinan Pusat.
 - f. Membantu Bendahara Umum dalam mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Pimpinan Pusat.
 - g. Membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan Pusat.
 - h. Membantu Bendahara Umum dalam membina Biro Keuangan.

Dalam melakukan regulasi organisasi khususnya yang berkaitan dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Unsur Pembantu Pimpinan (UPP), Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan sejumlah Pedoman dan Peraturan untuk menyerap dinamika sekaligus untuk efisiensi, efektivitas, dan mengedepankan kemaslahatan yang lebih luas. Pedoman dan Peraturan merupakan komponen organisasi untuk mengatur dan menertibkan berbagai hal di lingkungan Persyarikatan yang tidak diatur langsung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, seperti Qaidah, Pedoman, Kebijakan, Penetapan dan Edaran dan sebagainya. Peraturan ini juga menjadi kebijakan dan respons Pimpinan Pusat atas kondisi dan persoalan yang muncul. Selama periode 2010-2015 Pimpinan Pusat telah menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.O.B/2011 tanggal 10 Sya'ban 1432 H/12 Juli 2011 M tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 87/KEP/I.O/B/2011 tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H/02 Mei 2011 M tentang Majelis Pembina Kesehatan Umum
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O.B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2015 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Majelis Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.O/B/2015 tanggal 24 Zulkaidah 1433 H/10 Oktober 2012 M tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Tarjih dan Tajdid
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang

Majelis Tabligh

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H tentang Majelis Pendidikan Kader
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Pelayanan Sosial
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 07/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Pemberdayaan Masyarakat
13. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Hukum dan HAM
14. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 09/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Lingkungan Hidup
15. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 10/PRN/B/2015 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Majelis Pustaka dan Informasi
16. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 11/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
17. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 13/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Penelitian dan Pengembangan

19. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 14/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Penanggulangan Bencana
20. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 15/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah
21. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 16/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 17/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
23. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PRN/B/2015 tanggal 19 Sya'ban 1436 H/6 Juni 2015 M tentang Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional.

Konsolidasi organisasi yang sama pentingnya ialah pengelolaan keuangan Persyarikatan. Keuangan Persyarikatan dikelola dengan sistem cash management sehingga lebih efisien, transparan, akuntabel, dan lebih produktif. Kebijakan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah bank syariah yang melayani tabungan, pinjaman, dan iuran anggota Persyarikatan. Program ini masih dalam tahap sosialisasi dan diharapkan dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota, pimpinan, dan AUM.

Adapun Kebijakan kebendaharaan dan keuangan yang dilaksanakan antara lain adalah:

1. Mengefektifkan dan mengefisiensikan sumber dana Persyarikatan dengan mengevaluasi dan menata seluruh regulasi yang diterbitkan Persyarikatan mengenai sumber dana (iuran dan infaq) yang selama ini berlaku;
2. Membangun sistem tatakelola kebendaharaan dan keuangan melalui sistem manajemen kas (cash management) dengan menerbitkan SK nomor 36/KEP/I.O/C/2012 tentang Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; SK nomor

37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syari'ah Mitra Muhammadiyah dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; dan SK nomor 38/KEP/I.0/C/2012 tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Dengan Pelayanan Terpadu Manajemen Kas dengan memanfaatkan jasa pelayanan 7 Bank Syari'ah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syari'ah di masing-masing propinsi maka transaksi keuangan Persyarikatan dan AUM dapat terpadu;

3. Menggunakan layanan teknologi perbankan dalam rangka mempermudah pembayaran atau penarikan iuran dan infaq dengan sistem autodebet sesuai SK nomor 38/KEP/I.0/C/2012. Menata pendistribusian dana yang terhimpun dari iuran dan infaq kepada setiap jenjang Persyarikatan termasuk 'Aisyiyah sesuai ketentuan SK nomor 38/KEP/I.0/C/2012;
4. Mendorong dan memfasilitasi setiap jenjang Persyarikatan dan AUM untuk mendayagunakan dana yang ada dalam bentuk investasi yang aman dan menguntungkan guna meningkatkan pendapatan Persyarikatan dan AUM;
5. Merancang dan mengelola dana yang ada untuk diinvestasikan ketempat-tempat yang aman, menguntungkan dan strategis, dan;
6. Melakukan sosialisasi SK nomor 36/KEP/I.0/C/2012, nomor 37/KEP/I.0/C/2012, dan nomor 38/KEP/I.0/C/2012 keseluruh Jenjang Persyarikatan dan AUM, dan menyelenggarakan Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dengan sistem regional di tiga tempat yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Makasar. Sosialisasi Layanan Manajemen Kas sudah berlangsung di hampir semua PWM.

III. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ORGANISASI DAN JARINGAN

Organisasi modern memerlukan tatakelola yang semakin canggih. Untuk efisiensi pendaftaran anggota dan penerbitan

Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) telah diluncurkan KTAM online. Dengan KTAM online ini *entry* data dan penerbitan KTAM bisa dilakukan oleh PWM dengan data tetap terpusat di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan berbasis website. Saat ini 27 PWM telah mengaplikasikan KTAM online. Harapannya, pada akhir periode semua PWM telah mengaplikasikan KTAM online tersebut. Program ini tentu tidak sekadar perubahan teknologis, tetapi harus disertai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas anggota Muhammadiyah yang semakin baik.

Untuk memberikan layanan informasi, publikasi, dan komunikasi antara Muhammadiyah dengan masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyempurnakan kualitas isi, meningkatkan kapasitas dan tampilan website serta pengembangan siaran radio streaming. Di samping memuat berita dinamika organisasi, website ini juga memuat tuntunan beragama, putusan tarjih, tanya jawab agama, amal usaha dan ortom. Website ini memiliki 600 subdomain yang dipersiapkan untuk menampung website Majelis/Lembaga, Ortom, PWM, PDM dan AUM. Sayangnya sebagian besar subdomain yang tersedia belum dimanfaatkan karena tingkat kesadaran dan budaya pemanfaatan website sebagai media sosialisasi dan informasi gerakan yang masih rendah. Selain itu, informasi yang tersedia di dalam subdomain tidak aktual karena data dan informasi yang tidak diperbaharui. Termasuk usaha memperluas dan meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat website Muhammadiyah disajikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.

Di berbagai daerah banyak radio komunitas dan komersial yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi radio Muhammadiyah tersebut belum memiliki jaringan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perannya sebagai media penyiaran, hiburan, dan dakwah Islam belum optimal. Pimpinan Persyarikatan perlu memfasilitasi dan mengembangkan jejaring antar radio Muhammadiyah. Radio masih menjadi media komunikasi yang populer, selain televisi, lebih-lebih bagi masyarakat umum.

Penerbitan resmi Muhammadiyah dalam bentuk buku, majalah, dan jurnal sebagai media sosialisasi kebijakan, pemikiran, dan pandangan Muhammadiyah sudah cukup berkembang. Namun demikian keberadaan, mutu, dan tiras penerbitan Muhammadiyah seperti Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah Tabligh, dan Majalah Suara 'Aisyiyah masih perlu ditingkatkan. Karena itu diperlukan kebijakan pimpinan Persyarikatan dan AUM untuk meningkatkan kualitas SDM dan jumlah pelanggan. Peningkatan kualitas isi dan tampilan media cetak milik Persyarikatan tersebut tidak akan signifikan untuk meningkatkan tiras manakala tidak disertai dengan mobilisasi resmi dan peningkatan kesadaran rasa memiliki dari setiap anggota, pimpinan, AUM, dan keluarga besar Muhammadiyah untuk berlangganan. Selain itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah mengembangkan percetakan PT Gramasurya yang besar dan representatif di Yogyakarta yang melibatkan amal usaha dengan tujuan menyatukan kekuatan dan sinergi di bidang ini yang potensi dan peluangnya sangatlah besar.

Pengembangan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat sebagai amal usaha Muhammadiyah perlu mendapatkan perhatian. Jumlah Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah di berbagai jenjang masih sangat terbatas. Diperlukan usaha-usaha terpadu dan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mengembangkan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat sebagai sarana pendidikan, pencerdasan bangsa, dan dakwah Muhammadiyah. Padahal sejak berdiri Muhammadiyah memelopori gerakan taman pustaka sebagai bagian dari ikhtiar membangun kegemaran membaca dan budaya keilmuan dalam satu spirit pembaruan.

Muhammadiyah mengalami perkembangan yang menggembirakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan Mauritius telah berdiri Organisasi Saudara (Sister Organization), dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Organisasi ini tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan Prsyarikatan

Muhammadiyah Indonesia, tetapi memiliki kesamaan tujuan, dasar, dan prinsip perjuangan.

Di sisi lain, pemekaran propinsi atau kabupaten/kota memberikan hikmah tersendiri dan ikut memotivasi berdirinya Wilayah dan Daerah Muhammadiyah baru. Dalam periode 2010-2015 ini telah disahkan berdirinya Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, serta 29 buah Daerah Muhammadiyah baru. Sehingga jumlah Wilayah Muhammadiyah sekarang ini sebanyak 34 wilayah, sedang jumlah Daerah sebanyak 448 daerah. Dengan demikian jumlah Daerah mencapai 86,99 % dari jumlah Kabupaten/Kota menurut Kementerian Dalam Negeri seluruhnya berjumlah 515 buah (data per 18 Maret 2015).

Daerah yang dibentuk pasca Muktamar ke-46 itu ialah: Daerah Kab Aceh Jaya (Aceh); Daerah Kota Subulussalam (Aceh); Daerah Kota Payakumbuh (Sumatera Barat); Daerah Kota Solok (Sumatera Barat); Daerah Kab kepulauan Meranti (Riau); Daerah Kota Sungai Penuh (Jambi); Daerah Kab PALI (Sumatera Selatan); Daerah Kab Bengkulu Tengah (Bengkulu); Daerah Kab Mesuji (Lampung); Daerah Kab Pesisir Barat (Lampung); Daerah Kab Pangandaran (Jawa Barat); Daerah Sumba Tengah (NTT); Daerah Kab Kayong Utara (Kalimantan Barat); Daerah Kab Sukamara (Kalimantan Tengah); Daerah Kab Balangan (Kalimantan Selatan); Daerah Kota Kotamobagu (Sulawesi Utara); Daerah Kab Minahasa Utara (Sulawesi Utara); Daerah Kab Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara); Daerah Kab Wakatobi (Sulawesi Tenggara); Daerah Kab Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara); Daerah Kab Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara); Daerah Kota Tual (Maluku); Daerah Kab Kepulauan Morotai (Maluku Utara); Daerah Kab Pohnpei (Gorontalo); Daerah Kab Gorontalo Utara (Gorontalo); Daerah Kab Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau); Daerah Kab Mamuju Utara (Sulawesi Barat); Daerah Kab Raja Ampat (Papua Barat); dan Daerah Kab Teluk Wondama (Papua Barat).

Selain pembentukan Wilayah dan Daerah baru, pasca Muktamar

ke-46 juga ditandai dengan pembentukan Cabang dan Ranting baru. Dari laporan Pimpinan Wilayah yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat, dapat diidentifikasi adanya perkembangan organisasi yang cukup menggembirakan di berbagai daerah, berupa pembentukan Cabang dan Ranting baru. Sejak awal periode ini (2010) sampai akhir periode (2015), tercatat penambahan jumlah Cabang sebanyak 312 buah, dan penambahan jumlah Ranting sebanyak 860 buah. Sehingga jumlah Cabang sekarang ini sebanyak 3.566 buah, sedang jumlah Ranting sebanyak 13.570 buah.

Perkembangan organisasi juga ditandai dengan bertambahnya 2 buah Cabang Istimewa Muhammadiyah (CIM) di Luar Negeri yaitu CIM Rusia; dan CIM Taiwan. Sehingga Sampai akhir periode ini telah dibentuk 15 CIM, yaitu : CIM Kairo-Mesir; CIM Republik Islam Iran; CIM Khartoum-Sudan; CIM Belanda; CIM Jerman; CIM Inggris; CIM Libya; CIM Kualalumpur; CIM Perancis; CIM Amerika Serikat; CIM Jepang; CIM Pakistan, CIM Australia, CIM Rusia, dan CIM Taiwan.

Dalam periode 2010-2015 ini hal lain yang juga penting ialah perkembangan amal usaha, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan dakwah. Dalam bidang pendidikan hingga akhir tahun 2014 Muhammadiyah memiliki 176 perguruan tinggi, 14346 TK ABA-PAUD, 2604 SD/MI, 1772 SM/MTs, 1143 SMA/SMK/MA, 71 SLB, 102 pondok pesantren, dan 15 Sekolah Luar Biasa. Di bidang kesehatan dan pelayanan sosial terdapat 457 Rumah Sakit dan Rumah Bersalin, 421 Panti Asuhan, 82 Panti Berkebutuhan Khusus, 78 Asuhan Keluarga, 54 Panti Jompo, 1 Panti Khusus Bayi Terlantar, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM. Dalam bidang dakwah terdapat 6.270 masjid dan 5.689 mushalla. Dalam bidang amal usaha ekonomi terdapat 437 BMT (Baitul Mal wa Tanwil), 762 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan 25 penerbitan, kelompok-kelompok usaha BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah), kelompok komunitas binaan program pemberdayaan masyarakat, dan berbagai amal usaha lainnya sebagai kiprah nyata Muhammadiyah untuk bangsa.

Untuk memperkuat sistem gerakan dan jaringan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan kerjasama (nota kesepahaman) dengan beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, antara lain dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pertanahan Nasional, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat. Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga bekerjasama dengan Bank Syari'ah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Mu'amalat Indonesia, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, BTN Syari'ah, dan Bank Danamon Syari'ah. Kerjasama luar negeri antara lain dengan pemerintah Inggris, Australia, San't Egidio, Salam World, dan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).

Perkembangan yang menggembirakan dapat dirujuk pada beragam keunggulan dalam merevitalisasi kegiatan lembaga pendidikan seperti SD kreatif, alternatif, inovatif, dan lain-lain. Demikian pula dengan pertumbuhan amal usaha kesehatan di berbagai daerah. Cabang dan Ranting unggulan juga mulai bertumbuhan di beberapa daerah, meskipun belum meluas dalam jumlah yang signifikan. Namun demikian patut diberi perhatian pula terhadap amal usaha yang harus berjuang menghidupi dirinya dengan segala keterbatasan, terutama di daerah-daerah terpencil, yang meniscayakan sinergi dan jaringan terpadu dengan amal usaha yang telah maju atau berkembang.

IV. PENEGUHAN IDEOLOGI, PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ANGGOTA DAN KADER

Ideologi sebagai keyakinan dan cita-cita hidup merupakan fondasi penting bagi Muhammadiyah. Muktamar ke-46 mengamankan program peneguhan ideologi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya anggota dan kader untuk dilaksanakan secara lebih tersistem. Kalau diibaratkan dalam personifikasi manusia, peneguhan ideologi anggota dan kader adalah jiwanya, sedangkan peningkatan sumber daya kader dan anggota merupakan

tubuhnya. Peneguhan jiwa/ideologi dan peningkatan kualitas kesehatan tubuh/sumber daya anggota dan kader harus dilakukan secara serentak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dengan cara demikian dapat terbentuk profil kader dan anggota yang ideal, yaitu ideologinya kokoh dan kapasitas dirinya berkualitas unggul.

Peneguhan ideologi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya anggota dan kader memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis bagi kelangsungan Persyarikatan. Turun naik dan dinamika Persyarikatan sangat terkait dan bergantung pada kapasitas kader dan anggotanya. Hal ini terjadi karena secara normatif organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Bila kader dan anggota yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang teguh dan kapasitas yang berkualitas, maka dengan sendirinya kualitas Persyarikatanpun akan terbangun dengan unggul. Demikian pula sebaliknya, dalam tubuh Persyarikatan yang berkualitas akan lahir anggota dan kader yang berkualitas utama.

Jika dalam lingkungan persyarikatan terpatri pesan Kyai Haji Ahmad Dahlan, “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah”, maka pesan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kader dan anggota Persyarikatan yang berideologi teguh dan memiliki kapasitas diri yang unggul senantiasa berusaha menghidup-hidupi Muhammadiyah. Menghidupkan Muhammadiyah meliputi jiwa/ideologis, visi, cita-cita, dan aksi gerakan secara menyeluruh menuju kemajuan yang mencerahkan. Makna terpenting dari pesan Kyai Haji Ahmad Dahlan di atas adalah bahwa pimpinan Persyarikatan berkewajiban membina anggota dan kader secara sungguh sehingga para kader dan anggota memiliki tanggung jawab moral untuk terus menerus menghidupkan dan menggerakkan Muhammadiyah di mana pun dan kapan pun berada. Perpaduan komitmen ideologis dengan kualitas kepribadian (akhlak/karakter mulia), wawasan keilmuan, keahlian, dan pengkhidmatan yang tinggi yang dimiliki kader dan anggota Muhammadiyah merupakan keniscayaan yang telah terbukti dan akan menjadi

modal sumberdaya manusia yang unggul dan strategis bagi kemajuan gerakan di tengah persaingan yang kompetitif dalam jagad pergerakan keagamaan dan kemasyarakatan kontemporer.

Kegiatan peneguhan ideologi dikembangkan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, ideopolitor, kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Pelatihan Praktek Ibadah, dan Kajian Tafsir Al-Tanwir. Darul Arqam/Baitul Arqam telah dilaksanakan di tingkat Persyarikatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting) dan AUM, walaupun pelaksanaannya belum merata. Perkembangan cukup positif berkembang di AUM yang melakukan beragam kegiatan peneguhan ideologi secara lebih terencana, meskipun harus diakui masih terdapat AUM yang belum melaksanakannya dalam program yang terintegrasi. Disamping masalah model, waktu pelaksanaan, kompetensi peserta, keterbatasan sumberdaya, alumni Darul Arqam/Baitul Arqam belum diberdayakan dengan maksimal, untuk itu diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan program-program Muhammadiyah. Di sinilah pentingnya komitmen pimpinan Persyarikatan dan pimpinan AUM dalam mewujudkan program peneguhan ideologi, serta dalam pembinaan kader dan anggota secara lebih tersistem.

Kajian Ideopolitor (ideologi, politik, dan organisasi) yang diikuti oleh jajaran pimpinan Persyarikatan dan pimpinan AUM sangat bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan kapasitas pimpinan. Walaupun, kajian ini baru berjalan di tingkat pusat, kini mulai terdapat daerah yang melakukan, sehingga diharapkan program Ideopolitor dapat meluas di tingkat wilayah dan daerah. Dinamika otonomi daerah yang pesat dan perkembangan masyarakat setempat yang luar biasa dengan segala dampaknya memerlukan antisipasi yang cerdas, arif, visioner, dan sistematis dari pimpinan Persyarikatan di wilayah dan daerah. Muhammadiyah dituntut menjadi kekuatan Islam alternatif yang membawa misi dakwah dan tajdid yang mencerahkan di tengah dinamika daerah yang mutakhir dan kompleks itu.

Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah sangat diperlukan dalam rangka peneguhan ideologi bermuhammadiyah, dengan jalan merevitalisasi pemahaman yang terkandung dalam Muqadimah Anggaran Dasar, Kepribadian dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah, serta Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kajian ini banyak dilakukan di berbagai institusi Peryarikatan termasuk AUM, dan perlu digerakkan secara lebih intensif sehingga berkualitas baik substansi maupun aplikasinya. Dengan demikian, akan semakin dipahami hakikat Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara komprehensif, sekaligus dapat dicegah kecenderungan sebagian aktivis dan warga Muhammadiyah yang tertarik kepada faham lain yang berkembang di tengah masyarakat.

Peningkatan kualitas praktek ibadah sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah juga penting untuk diintensifkan disertai dengan peningkatan kekhushyukan dan fungsi kebaikan dari pelaksanaan ibadah mahdhah tersebut dalam kehidupan. Praktik ibadah mahdhah yang benar dapat menumbuhkan militansi dan menjadikan ciri khas yang membedakan cara beramal ibadah dengan mereka yang bukan Muhammadiyah, sekaligus menumbuhkan kesalihan individual dan kesalihan sosial yang fungsional bagi kehidupan yang tercerahkan. Pelatihan praktek ibadah, khususnya ibadah mahdhah, sebagaimana tuntunan Tarjih Muhammadiyah, sangat diperlukan bagi anggota Muhammadiyah. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang peribadatan di forum-forum Muhammadiyah dan juga dalam Majalah Suara Muhammadiyah, menunjukkan bahwa pelatihan praktek ibadah ini sangat diperlukan.

Semangat berzakat juga terus ditingkatkan, termasuk melalui Lembaga ZIS Muhammadiyah Pusat dan Wilayah/Daerah. PDM Kendal Wilayah Jawa Tengah pada tahun 1432 H telah berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp. 2.506.412.801,- (dua milyar lima ratus enam juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus satu rupiah) dengan jumlah muzaki 5.798 orang. Karena ketertiban administrasinya, maka muzakkinya tidak terbatas hanya dari warga Muhammadiyah saja. Sungguh betapa besar kekuatan zakat

yang dihimpun oleh Muhammadiyah, jika sebagian besar Daerah Muhammadiyah mengikuti jejak yang baik tersebut.

Penyusunan Tafsir Al-Tanwir, yaitu tafsir produk Majelis Tarjih, kehadirannya sangat dirindukan. Kehadiran Tafsir Al-Tanwir menjadi keniscayaan karena Muhammadiyah sejak berdiri mengusung tema besar dan fundamental, yakni *al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah*. Saat ini tafsir al Tanwir sudah bisa dinikmati melalui majalah Suara Muhammadiyah yang terbit secara berkala setiap dua minggu.

Dalam usaha peningkatan dan pengembangan sumberdaya anggota, diselenggarakan pengajian kelompok, tuntunan ibadah, sosialisasi paham agama dalam Muhammadiyah dan pendampingan anggota. Pengajian kelompok, Ranting, Cabang, Daerah, secara mingguan, bulanan mulai semarak dilakukan, bahkan ada yang membuat model Hari ber-Muhammadiyah di sejumlah daerah di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan wilayah lainnya. Pengajian ini sangat besar manfaatnya dalam menumbuhkan kegembiraan kebanggaan, dan semangat ber-Muhammadiyah. Model pengajian ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya di berbagai Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Sosialisasi faham agama dan pemikiran Muhammadiyah telah disampaikan melalui berbagai media, seperti Majalah Suara Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah, Majalah Suara 'Aisyiyah, Majalah Al-Manar, Majalah Tabligh, Tuntunan Islam Majelis Tabligh, dan media yang diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan AUM seperti Majalah Matan yang diterbitkan oleh PWM Jawa Timur. PP Muhammadiyah juga sedang memproses pencetakan ulang buku HPT, Tanya Jawab Agama (jilid 1-6), dan Manhaj Gerakan Muhammadiyah untuk dikirim ke seluruh Cabang, Daerah, dan Wilayah.

Peningkatan dan pengembangan sumberdaya kader, di antaranya dilakukan dengan meningkatkan kualitas Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah, mengintensifkan penyelenggaraan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM)

dan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, pengembangan madrasah dan pondok pesantren modern di berbagai daerah, dan peningkatan kapasitas sumberdaya kader Muhammadiyah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah lainnya. Permasalahannya, PUTM dan Shabran kurang mendapatkan sambutan dari Pimpinan Persyarikatan di tingkat Wilayah dan Daerah dan minimnya peminat yang berkualitas. Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 mengamanatkan pengembangan madrasah dan pesantren sebagai lembaga perkaderan Muhammadiyah untuk dikelola dengan lebih berkualitas, di samping lembaga pendidikan umum yang sama pentingnya bagi kelangsungan gerakan.

Peningkatan sumberdaya kader dengan model beasiswa kader, selama ini berjalan belum sistematis atau terprogram masif, artinya para kader Muhammadiyah yang aktif lebih terbatas hanya mencari rekomendasi untuk mengikuti studi lanjut. Idealnya, beasiswa kader ini dikelola secara terstruktur, artinya ada institusi Muhammadiyah yang membina kader dan mencarikan peluang studi lanjut, sehingga ikatan antar kader dengan persyarikatan sangat kuat, karena tidak sekedar memberi surat rekomendasi saja. Beasiswa kader sangat penting, terutama bagi Wilayah dan Daerah bagian Indonesia Timur. Di sinilah peran atau fungsi AUM sangat diperlukan dalam mendukung dan mewujudkan program beasiswa bagi kader/aktivis Muhammadiyah yang di belakang hari akan menjadi generasi penerus perjuangan Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua yang sarat tantangan kompleks.

V. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA, PRAKSIS SOSIAL, DAN KEGIATAN MAJLIS / LEMBAGA

Amal usaha adalah bagian integral dakwah dan usaha Muhammadiyah. Eksistensi amal usaha merupakan aktualisasi dan institusionalisasi amal-shalih serta representasi Muhammadiyah untuk melayani, memberdayakan, dan membantu masyarakat dan umat menyelesaikan problematika kehidupan yang kompleks. AUM merupakan basis dan agen dakwah, perkaderan dan praksis

sosial Muhammadiyah yang strategis. Kedepan penting untuk dikembangkan program terpadu yang menyinergikan AUM dengan layanan kaum dhu'afa dan mustadh'afin secara tersistem, dengan tetap menjaga kelangsungan dan kemajuan AUM tersebut.

PP Muhammadiyah juga mengapresiasi perkembangan positif sinergi dan integrasi AUM dengan Persyarikatan yang kini menjadi kekuatan yang penting bagi kemajuan Muhammadiyah. Komitmen dan kepedulian AUM dalam mendukung pelaksanaan program Persyarikatan di setiap tingkatan cukup positif, yang menunjukkan fungsi amal usaha sebagai pengemban misi Muhammadiyah. Jika dalam beberapa kasus masih dijumpai kesenjangan tertentu antara Persyarikatan dan AUM kami percaya dapat terpecahkan melalui komunikasi yang semakin intensif, sehingga ke depan kian tercipta integrasi yang lebih konstruktif. Pimpinan Persyarikatan di setiap tingkatan perlu semakin arif dalam membina AUM, sedangkan para pimpinan AUM diminta untuk lebih akomodatif dan komunikatif dalam membangun relasi organisasi dengan Pimpinan Persyarikatannya.

Memasuki abad kedua, jumlah dan mutu AUM terus mengalami peningkatan. Sekolah/madrasah tetap bertahan dan berkembang dengan baik, meski harus terus direvitalisasi. Demikian pula dengan pendidikan pesantren yang terus berkembang untuk memperkuat sistem pendidikan sekolah/madrasah, meningkatkan penguasaan ilmu agama dan akhlak mulia. Diantara sekolah, madrasah dan pesantren Muhammadiyah terdapat kecenderungan positif untuk mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama kurikulum, manajemen dan peningkatan sumberdaya manusia. Berbagai prestasi akademik seperti olimpiade sains, matematika, dan robotika tingkat lokal, nasional, regional dan internasional diraih oleh putera/puteri Muhammadiyah. Beberapa sekolah Muhammadiyah mampu mengembangkan teknologi terapan dan inovasi, seperti SMK Muhammadiyah Borobudur yang berhasil mengembangkan mobil "Sang Surya" sebagai rintisan mobil nasional.

Walau demikian, masih terdapat kesenjangan mutu sekolah, madrasah dan pesantren Muhammadiyah. Banyak sekolah/madrasah yang tidak mampu bertahan, ditutup atau mengalami metamorphosis karena alasan-alasan pragmatis. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan mutu antara lain salah kelola, konflik kepentingan dan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan daerah serta perkembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbangunnya kekuatan Muhammadiyah dalam pendidikan yang unggul, bersifat holistik dan bertatakelola baik di tingkat nasional dan regional. Oleh karenanya Muhammadiyah perlu secara terus menerus mendorong pengelolaan lembaga pendidikan yang inovatif dan berkualitas unggul. Dari 24 program yang telah disusun, terdapat 5 (lima) program prioritas sebagai fokus pembinaan yaitu meliputi; (1) Peningkatan Kualitas kepala Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren, (2) Pengembangan Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren sebagai Basis Kaderisasi, (3) Pengembangan Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren Unggulan dan Model, (4) Penguatan dan Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur sekolah/madrasah/madrasah/Pondok Pesantren, dan (5) Olimpiade Ahmad Dahlan (Olimpicad).

Hal inilah yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain dengan mengadakan ToT Manajemen sekolah sebanyak 4 angkatan, training manajemen kepala sekolah sebanyak 5 angkatan, pelatihan penguatan implementasi kurikulum 2013, Diseminasi kurikulum, dan lokakarya peningkatan kualitas MTs.

Demikian pula dengan PTM. Secara kuantitatif, jumlah PTM menurun karena adanya merger beberapa akademi, sekolah tinggi dan institut menjadi universitas. Penggabungan ini berdampak positif terhadap efisiensi, penguatan kelembagaan, dan daya saing PTM. Terdapat semangat yang tinggi di beberapa Pimpinan Daerah dan Wilayah untuk mendirikan PTM baru. Beberapa PTM membuka program studi, jurusan baru, dan jenjang pasca sarjana.

Selain peningkatan kerjasama antar PTM, beberapa PTM terus mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama PTM dengan sekolah, madrasah, pesantren dan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah di berbagai tingkat juga semakin meningkat.

Pelaksanaan program kerja Majelis Dikti selalu memperhatikan kualitas dan dinamika masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Hal ini dilakukan mengingat tingkat kualitas PTM yang sangat berbeda-beda baik dari sisi sumberdaya manusia, sumberdana, sarana-prasarana, prestasi akademik dan faktor lain yang berkaitan dengan mutu.

Pada awal periode (2011-2012) Majelis Dikti menitikberatkan program konsolidasi PTM dan Sosialisasi Pedoman Pendidikan Tinggi, Ketentuan Majelis, dan Kebijakan Program Majelis. Program dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Pimpinan PTM (Rektor, Ketua, dan Direktur), Bidang II (Keuangan SDM dan Sarana Prasarana, Bidang III tentang Kemahasiswaan).

Memasuki Tahun ke tiga (2013-2014), Majelis memfokuskan program peningkatan tatakelola PTM menuju tatakelola PTM yang baik (*good university governance*) dan penguatan kelembagaan. Implementasi kegiatan tersebut meliputi sinergi antar PTM dalam pembinaan dan penguatan SDM, pejaminan mutu, penelitian dan pengabdian masyarakat dan Akreditasi Institusi. Kegiatan dalam pendampingan Akreditasi Intitusi memerlukan energi dan waktu yang cukup besar dalam memenuhi ketentuan dari Undang Undang. Saat ini 18 PTM/PTA telah terakreditasi: A= 2, B= 6 dan C=8. Secara nasional, ada lima perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, dua diantaranya adalah PTM (Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Di luar Jawa, terdapat lima PTS yang terakreditasi B, tiga diantaranya adalah PTM (Stikes Muhammadiyah Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Universitas Muhammadiyah Makassar).

Program Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di PTM dilaksanakan melalui penerbitan Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah PTM (2013), dan workshop penyusunan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk PTM. Workshop AIK diselenggarakan oleh Majelis Dikti di Jogjakarta sebanyak dua kali dan diikuti oleh dosen tetap PTM yang ditunjuk oleh Majelis Dikti. Hasil dari workshop tersebut adalah bahan yang akan digunakan dalam penyusunan materi AIK PTM.

Ada tiga PTM baru, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah (STIKOM) Batam dan IKIP Muhammadiyah Maumere, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Penambahan ini menjadikan jumlah seluruh PTM sebanyak 174, terdiri dari 40 Universitas, 1 institut, 96 Sekolah Tinggi, 22 Akademi, 4 Politeknik, dan 11 Perguruan Tinggi 'Aisyiyah. Saat ini juga sedang diproses untuk pendirian 8 universitas Muhammadiyah / 'Aisyiyah yang merupakan pengembangan dari PTM yang telah ada maupun PTM baru, yaitu Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, UM Kaltim, UM Kalsel, UM Bandung, UM Bogor, UM Lamongan, UM Sidrap, dan UM Maluku.

Tatakelola PTM juga mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan meningkatnya jumlah RAPB PTM baik dari sisi besaran anggaran, maupun banyaknya PTM yang menyusun RAPB. Dan khusus untuk PTM di kawasan Indonesia Bagian Timur, UM Maluku Utara, STKIP Muhammadiyah Sorong, UM Sorong, STKIP Muhammadiyah Manokwari, STIKOM Muhammadiyah Jayapura, dan UM Kupang, menunjukkan eksistensi PTM di wilayah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Tentu hal tersebut merupakan pertanda ke depan Matahari Muhammadiyah akan bersinar lebih terang dan mencerahkan, khususnya di Indonesia Bagian Timur.

Muhammadiyah memiliki 9 fakultas kedokteran di lingkungan PTM yang tiap tahunnya melahirkan lebih dari 500 orang dokter. Namun kondisi klinik Muhammadiyah/Aisyiyah masih belum menggembirakan. Tidak sedikit klinik yang tersendat

perkembangannya, bahkan ada yang tidak beroperasi lagi karena kekurangan tenaga dokter dan minimnya modal. Oleh karenanya perlu penguatan jejaring antara PTM yang memiliki program studi bidang kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dll) dengan Rumah Sakit dan klinik Muhammadiyah/Aisyiyah agar bisa saling bekerja sama dan bersinergi. Juga perlu penguatan jejaring antara RS sakit yang sudah mapan sebagai Rumah Sakit Pembina dengan klinik yang ada di sekitarnya. Upaya sentralisasi pengadaan obat, alat kesehatan dan logistik bagi AUM Kesehatan terus dikembangkan.

Dalam bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), 'Aisyiyah mengembangkan Kelompok Bermain dan Bustanul Athfal. Pengembangan PAUD ini sangat penting dan strategis untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dan dasar-dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu perlu dipersiapkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan kepribadian bekerjasama dengan PTM.

Pemerintah semestinya lebih memberikan perlakuan yang sama terhadap lembaga pendidikan swasta, lebih-lebih pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah yang telah berkiprah banyak jauh sebelum Republik ini merdeka. Kyai Haji Ahmad Dahlan bahkan berhak dan layak untuk diangkat sebagai Pelopor Pendidikan Nasional atas kiprahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang membuahkan berbagai jenjang pendidikan Muhammadiyah tersebar masif di seluruh tanah air. Kiprah tersebut tak ternilai harganya dalam pertumbuhan, perkembangan, dan proyeksi masa depan bangsa ini.

Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui rumah sakit, klinik, balai pengobatan, dan panti asuhan. Jumlah amal usaha kesehatan Muhammadiyah terus meningkat. Beberapa universitas mengembangkan rumah sakit pendidikan yang terintegrasi dengan PTM atau rumah sakit Muhammadiyah. Yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah diterbitkannya undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan, undang-undang

pelayanan jaminan sosial yang berpengaruh langsung terhadap sistem pelayanan, manajemen dan pendirian amal usaha kesehatan, khususnya rumah sakit. Sistem pengelolaan panti asuhan juga harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Beberapa panti asuhan mulai dirubah menjadi pesantren panti dan pelayanan sosial berbasis keluarga. Di tengah berbagai tantangan eksternal tersebut, baik rumah sakit dan panti asuhan Muhammadiyah berhasil mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang pemberdayaan dan layanan kesehatan masyarakat.

Universal Coverage merupakan salah satu isu aktual dalam sistem pembiayaan kesehatan saat ini, khususnya di Indonesia. Konsep universal coverage ini membutuhkan data based sebagai dasar untuk menganalisis kebijakan atau membuat kebijakan, dimana visinya adalah seluruh rakyat Indonesia selama berada di wilayah NKRI bisa memperoleh akses pelayanan kesehatan. Adanya kebijakan berupa UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU nomor 04 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diharapkan menjadi solusi bagi pencapaian *universal coverage* di Indonesia. Maka PKO *Universal Coverage* adalah sebuah gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam penambahan 1000 TT (Tempat Tidur) pasien yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pencapaian penyediaan jumlah TT untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan. Sejak diberlakukannya program JKN/BPJS 2014 diperlukan 100.000 TT untuk dapat menampung pasien.

Peningkatan Kualitas sumber daya insani antara lain diwujudkan dengan: penandatanganan MoU dengan LKBK (Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan) tentang Peningkatan Kapasitas dokter Umum; penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Persatuan Dokter Emergensi Indonesia dalam program peningkatan kapasitas SDM dalam kegawat-daruratan & bencana di lingkungan Amal Usaha Kesehatan dan pendidikan kedokteran dan kesehatan Muhammadiyah (11 Nopember 2012); Menyelenggarakan Darul Arqam untuk Direksi RSMA/Pimpinan Amal Usaha Kesehatan

Muhammadiyah/Aisyiyah, dengan tujuan untuk penguatan ideologi di kalangan pimpinan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah (2013, 2014 dan 2015); Menyelenggarakan *Workshop Clinical Leadership* (2013); telah diterbitkan Buku Panduan Dakwah Rumah Sakit, dan buku *Holistic Health Care (Psychospiritual Health Care)*.

Dalam upaya mendorong budaya kewirausahaan di kalangan warga Persyarikatan, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan membina beberapa usaha mikro dan kecil, seperti usaha pembuatan bisnis kue di Bogor, Rumah mode Busana Muslim di Depok, Usaha kuliner dan kerajinan di Tangerang, Usaha produksi air minum dalam kemasan di Depok, Serang, Rembang dan Cianjur, Usaha / bisnis ritel swalayan “Surya Mart” di Jawa Timur dan “Mentari” di Sumatra Barat. Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) juga menjadi perhatian. Pelatihan BTM dan BMT dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu di Bogor, Lasem, Pekalongan dan Makasar.

Pemanfaatan asset dan wakaf tanah, yang berdasarkan kajian dan inventarisasi sederhana yang dilakukan Majelis Ekonomi & Kewirausahaan terdapat sekitar 3.717 ha asset & wakaf tanah persyarikatan. 24% atau sekitar 895 ha telah dimanfaatkan untuk Perguruan Tinggi. 61% atau sekitar 2.260 ha dimanfaatkan untuk ribuan Sekolah yang dimiliki Muhammadiyah, 6% atau sekitar 219 ha tanah Muhammadiyah dimanfaatkan atau diproduktifkan untuk Rumah Sakit. Sementara 0,81 % atau sekitar 30 ha dimanfaatkan untuk Panti asuhan, kemudian sekitar 3,4% telah diproduktifkan dengan tanaman ringan dan tanaman keras seperti sawit, kayu, kebun dan lain-lain. Sedangkan sisanya 8,64% atau sekitar 321 ha masih dalam bentuk semak belukar dan hutan serta tanah kosong.

Pengembangan Koperasi, jumlah dan kualitas BTM merupakan unggulan Majelis Ekonomi & Kewirausahaan dalam dua periode terakhir ini. Capaian dari program ini dapat disampaikan, bahwa peningkatan jumlah Koperasi dan BTM tidak mengalami peningkatan yang berarti, misalnya BTM yang semula berjumlah 241, hanya bertambah 28, dan 6 dilikuidasi. Namun secara kualitas dilihat dari pertumbuhan asset khususnya BTM yang menjadi

obyek kajian Majelis Ekonomi & Kewirausahaan dapat dilaporkan, bahwa jumlah asset BTM diperkirakan mencapai Rp. 1,85 triliun. 32,40% atau sekitar Rp. 599,49 milyar berasal dari 56 BTM yang ada di Lampung dan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada BTM/ BMT di Lampung & Jawa Tengah telah memiliki anggota binaan sekitar 175 ribu usaha mikro.

Usaha-usaha di bidang ekonomi diperkuat dengan perkembangan mini market, pemanfaatan lahan wakaf, dan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga keuangan di dalam dan luar negeri. Termasuk Bina Ekonomi Keluarga (BUEKA) yang dikembangkan 'Aisyiyah hingga ke akar rumput. Berbagai usaha juga terus dikembangkan untuk pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Muhammadiyah berusaha meningkatkan kemampuan dan ketrampilan (*capacity building*) petani dan nelayan. Inovasi-inovasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan dengan pertanian pola organik yang pembinaannya dilakukan dengan pendekatan *dakwah jamaah*. Yang perlu mendapat perhatian adalah keberlangsungan dan pengembangan di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting, serta perluasan jaringan pemasaran untuk memperkuat dampak ekonomi gerakan Muhammadiyah bagi masyarakat.

Sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah sering dinilai kurang perhatiannya terhadap upaya perbaikan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat memberikan obyek baru dalam wacana jihad, dengan menjadikan jihad menegakkan kedaulatan rakyat sebagai unggulan. Berbagai model pemberdayaan usaha mikro dan kaum marginal terus dikembangkan, seperti pendampingan abang becak di Yogyakarta, pendampingan pedagang asongan di Sleman, dan kelompok pengrajin usaha mikro di Kokap Kulonprogo dan Patuk Gunung Kidul. Begitu juga dengan pengembangan pertanian terpadu dan massifikasi model pertanian terpadu terus dikembangkan sebagai model bagi pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menunjukkan kepeloporan yang memberikan harapan positif bagi Muhammadiyah, terutama dalam mengimplementasikan teologi Al-Ma'un bagi masyarakat dhu'afa dan mustadh'afin. Pendampingan terhadap berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan kehidupan warga Muhammadiyah, seperti bidang pertanian terpadu dengan Pusat Pelatihannya, peternakan, perikanan, dan lembaga keuangan untuk masyarakat mulai menampakkan hasilnya. Pendampingan ini perlu dikembangkan menjadi gerakan yang lebih masif sifatnya. Agendanya bagaimana tempat-tempat yang pernah dijadikan uji coba kegiatan ini perlu didorong agar mampu menyebarluaskan ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Selain itu spirit dan model pemberdayaan berbasis Al-Ma'un perlu lebih dimasyarakatkan secara intensif di seluruh lingkungan dan institusi Muhammadiyah, termasuk di kalangan anggota pimpinan Persyarikatan dan pimpinan AUM, sehingga pemihakan terhadap kam dhu'afa dan mustadh'afin bergelora kembali sebagaimana kepeloporan Kyai Haji Ahmad Dahlan seratus tahun yang lalu.

Muhammadiyah juga meningkatkan perannya dalam pelestarian lingkungan hidup. Dampak pemanasan global yang berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan produktivitas pertanian dan kelautan serta kerusakan alam. Muhammadiyah berusaha meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui penerbitan, penyuluhan, dan gerakan peduli lingkungan seperti hemat energi, daur ulang dan pemanfaatan sampah. Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian untuk memperkuat kiprahnya dalam bidang lingkungan hidup. Tindak lanjut kerjasama dan usaha-usaha membangun budaya ramah lingkungan sangat diperlukan.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dewasa ini telah mencapai taraf yang memprihatinkan. Kerusakan alam dan dampak kerusakannya telah nyata terlihat. Muhammadiyah memandang bahwa permasalahan lingkungan bukan semata permasalahan

fisik-teknis, tetapi menyangkut juga cara pandang, moral dan perilaku. Berdasar keprihatinan tersebut, Muhammadiyah aktif dalam gerakan lingkungan. Berbagai kegiatan telah dilakukan, diantaranya kampanye gerakan lingkungan, pilot project pelaksanaan pendidikan lingkungan di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta; workshop Gerakan Shodaqoh Sampah di Samarinda, Makassar, Boyolali dan Bandung; dan advokasi bagi warga yang terkena dampak lingkungan di Srumbung, Magelang. Adapun yang bersifat pedoman, sudah diselesaikan pada tahun 2011 seperti penyusunan dan penerbitan buku Akhlak Lingkungan, buku Teologi Lingkungan, buku Panduan Shadaqah Sampah, dan buku panduan Aksi Hijau di Kantor.

Terjadinya bencana alam di Indonesia, memanggil kesadaran dan komitmen Muhammadiyah untuk melayani dan membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Kepedulian sosial Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menghadapi bencana. Muhammadiyah membentuk tim SAR dan relawan bencana. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan di luar negeri, Muhammadiyah memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan materi suplemen pendidikan sosial di sekolah.

Hidup di Indonesia yang rawan bencana, mengharuskan Muhammadiyah selalu siaga untuk memberikan pertolongan tanggap bencana. Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlibat langsung dalam respon tanggap bencana berupa asistensi, supervisi, pengiriman dana operasional posko dan pengiriman tim relawan. Peran langsung LPB Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kegiatan lapangan sejak tahun 2012/2013 sudah sangat berkurang dibanding tahun sebelumnya, karena peran tersebut sudah bisa dilaksanakan oleh LPB PWM / PDM. Peran LPB Pimpinan Pusat Muhammadiyah bergeser pada kegiatan asistensi, penguatan sistem manajemen tanggap bencana, penguatan kapasitas dan manajemen relawan, serta menginisiasi dan membuat pilot project program Sekolah siaga bencana.

Dalam bidang seni budaya, Muhammadiyah mulai mengembangkan semangat dan kegiatan seni budaya sebagai sarana dakwah. Berbagai usaha telah dilakukan melalui forum-forum apresiasi seni, pementasan wayang, dan kegiatan kebudayaan lainnya, termasuk apresiasi sastra melalui Majalah Suara Muhammadiyah. Usaha-usaha seni budaya perlu terus dikembangkan untuk melahirkan seniman dan budayawan Muhammadiyah dan membangun bangsa yang memiliki kekayaan spiritual humaniora dan berbudaya luhur.

Seni dapat memperhalus budi. Munas Tarjih memutuskan berkesenian hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah dan wajib, disamping bisa juga menjadi makruh dan haram. Dalam membiasakan berkesenian di lingkungan Muhammadiyah telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah pameran senirupa yang telah diadakan 4 kali, 3 kali di Yogyakarta dan 1 kali di Jakarta; forum apresiasi sastra, dan berbagai kegiatan seni yang terhimpun dalam kegiatan Gebyar Muharram. Juga beberapa pelatihan telah dilaksanakan, seperti pelatihan penulisan skenario dan naskah drama telah dilakukan 3 kali, dan pelatihan presenter TV, Workshop Pengajaran Lagu Anak telah dilakukan 13 kali di berbagai kota di Indonesia.

Majelis Tarjih dan Tajdid juga senantiasa melakukan penyegaran dan pengembangan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa hasil kajian yang sudah dirumuskan, disamping Tafsir al Tanwir yang terus dikerjakan, antara lain: Fikih Tatakelola, Fikih al-Maun, Tuntunan Seni Budaya Islam, dan Fikih Air. Disamping juga terus melakukan sosialisasi dan mengembangkan pandangan / pedoman hisab dengan melakukan berbagai sarasehan, seminar, pelatihan dan observasi hilal. Dalam rangka sosialisasi berbagai fatwa dan paham keagamaan, telah dikirim ke PWM, PDM dan PCM buku Tanya Jawab Agama jilid 1-6.

Banyaknya 'akar rumput' dan jamaah di masjid-masjid Muhammadiyah yang belum tersentuh oleh pembinaan pimpinan Muhammadiyah menjadi salah satu keprihatinan Majelis Tabligh.

Oleh karenanya Majelis Tabligh menggiatkan program rihlah dakwah yang berbasis pada masjid. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas jamaah, antara lain dengan gerakan tafhim al-Qur'an, pelatihan shalat sesuai tuntunan Rasulullah, dan pembiasaan 'sembilan kebiasaan emas' dalam kehidupan sehari-hari. Disamping beberapa kegiatan untuk perbaikan sistem gerakan, seperti peningkatan kualitas mubaligh, gerakan dakwah di rumah sakit dan dakwah jamaah.

Ketangguhan dan keteguhan dalam ber-Muhammadiyah dan berkhidmat di Persyarikatan harus dibangun di atas basis nilai-nilai ideologi gerakan. Keyakinan inilah yang mendorong dilakukannya Baitul Arqam di berbagai jenjang kepemimpinan dan AUM. sebanyak 45 Baitul Arqam di berbagai tempat pada tahun 2013 yang dihadiri, diisi ataupun yang dikelola oleh Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. Sebagai contoh, pelaksanaan Baitul Arqam yang dilakukan UMY untuk seluruh dosennya sebanyak 10 angkatan, dan yang dilakukan oleh RS Muhammadiyah Lamongan untuk seluruh pejabat struktural, tenaga medis dan paramedis sebanyak 7 angkatan, perlu ditiru AUM yang lain. Aroma gerakan Islam baru dan Islam politik yang mempengaruhi dalam tubuh Muhammadiyah dan AUM, serta rapuhnya ideologi sebagian warga persyarikatan menjadi 'PR' untuk ditangani secara serius di masa yang akan datang.

Visi Muhammadiyah 2025 bidang pustaka dan informasi adalah membangun kemampuan dan keluasan jaringan kekuatan informasi serta pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat informasi. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Muhammadiyah mendirikan stasiun televisi yang memiliki jangkauan nasional, bahkan internasional, yang diberi nama TV Mu. TV Mu ini diluncurkan pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung oleh berbagai AUM khususnya AUM Pendidikan Tinggi. Untuk sementara, TV Mu bisa dijangkau dengan internet dan antena parabola dengan 12 jam tayang dalam seharinya. Semoga dimasa yang akan datang bisa dijangkau lebih

mudah dan dengan acara yang jadi alternatif utama bagi warga muslim di Indonesia. Di bidang percetakan, PP Muhammadiyah mendirikan usaha percetakan yang modern dan representatif bernama PT Gramasurya untuk memenuhi kebutuhan cetak mencetak di lingkungan Muhammadiyah, dan juga untuk melayani kebutuhan masyarakat yang animo bacanya semakin tinggi. Majalah Suara Muhammadiyah juga semakin eksis terbit tengah bulanan dengan tiras 40 ribu eksemplar. Website Muhammadiyah dan radio streaming 'Radio Mu' juga masih terus mengudara. Juga akan segera dilaunching majalah 'Tanwir' untuk pencerahan bagi masyarakat umum. Majelis Pustaka dan Informasi juga terus menggalakkan pendirian taman pustaka dengan melaunching 'Gerakan 1000 Taman Pustaka Muhammadiyah' dan mendirikan Taman Pustaka Percontohan di Masjid Muhajirin dan Kalimosodo, Yogyakarta.

Banyaknya aset dan tanah wakaf Muhammadiyah yang belum mendapatkan pengamanan dengan sertifikat wakaf atau hak milik, mulai berbuah sengketa. Ada 34 kasus sengketa tanah wakaf / aset di berbagai daerah pada tahun 2013 yang sempat dikunjungi dan didampingi oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Oleh karenanya penertiban administrasi dan pensertifikatan aset hak milik dan wakaf perlu menjadi prioritas program. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran Persyarikatan dan AUM untuk melakukan penertiban terhadap tanah Persyarikatan lewat surat no. 05/INS/I.0/B/2012 tanggal 7 Desember 2012.

Pengembangan Cabang dan Ranting terus ditingkatkan. Disamping melakukan validasi data dan pembuatan peta Cabang / Ranting, berbagai upaya dilakukan, diantaranya adalah bekerjasama dengan PTM melalui program KKN tematik 'Pengembangan Ranting Muhammadiyah', kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian yang terkait dengan pengembangan Cabang dan Ranting. Buku seri Panduan Cabang dan Ranting sudah diterbitkan 10 judul di tahun 2012/2013, dan 10 judul lagi sudah diterbitkan tahun

2014. Pembuatan peta Cabang dan Ranting merupakan program unggulan LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hingga laporan ini dibuat, LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membuat dua peta Cabang dan Ranting berbasis provinsi: Peta Cabang dan Ranting di Provinsi DIY dan DKI Jakarta, dan sedang mengerjakan peta cabang dan ranting di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di samping kesibukannya melakukan audit terhadap AUM Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit yang dilakukan secara reguler sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan melaksanakan pelatihan tenaga auditor dan membuat software keuangan. Tujuan kegiatan pelatihan tenaga auditor adalah untuk kebutuhan regenerasi serta menghasilkan sumberdaya yang berkuatitas sesuai dengan fungsi dan tugas LPPK di Persyarikatan Muhammadiyah.

Membuat software keuangan untuk menyusun laporan keuangan secara *computerize*. LPPK berupaya membantu Kantor Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah dalam melakukan penyusunan laporan pengelolaan kekayaan dengan menyediakan software aplikasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi, seperti persyarikatan, Sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit.

VI. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN STRATEGIS MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah selama satu abad telah berkiprah untuk bangsa dan setelah kemerdekaan selalu membangun hubungan dan peran yang konstruktif dengan pemerintah serta elemen kekuatan bangsa. Selain peran dan kiprahnya dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan umat, memasuki abad ke dua Muhammadiyah lebih meningkatkan peran strategisnya dalam bidang politik kebangsaan, hukum, dan bidang lainnya, serta dalam mengembangkan kerjasama internasional. Muhammadiyah menjawab panggilan dan komitmen kebangsaan melalui prakarsa dan peran serta aktif dalam menyelesaikan berbagai problematika keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global.

Di dalam negeri, Muhammadiyah aktif memberikan masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Beberapa kali Muhammadiyah menyampaikan prasaran dan pandangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Muhammadiyah bersama elemen masyarakat madani juga aktif memberikan masukan dan kritik korektif untuk memperkuat demokrasi, *good governance* dan *clean government*, penegakan hak azasi manusia, keadilan, kerukunan intern umat Islam dan antar umat beragama dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah juga memediasi dan memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah melalui dialog dan kerjasama antar iman, termasuk di dalamnya pembentukan Humanitarian Forum Indonesia (HFI).

Dalam rangka penguatan peran kebangsaan, Muhammadiyah mendorong dan memfasilitasi kader-kadernya untuk berkiprah di lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, KPU, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPI, KPK, Bawaslu, dan lain-lain. Walaupun tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, Muhammadiyah aktif menjalin komunikasi dengan partai politik dalam merumuskan berbagai perundangan dan mempromosikan kader-kader Muhammadiyah untuk berhidmat di lembaga-lembaga negara. Disamping itu, Muhammadiyah menjalin kemitraan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif untuk memperluas dakwah Muhammadiyah dalam wilayah kebangsaan.

Ada empat buah undang undang yang diajukan oleh Muhammadiyah beserta elemen bangsa lainnya, untuk dilakukan pengujian konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi, dan semuanya dapat dimenangkan. Keempat UU tersebut yaitu pertama UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, UU no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketiga, UU no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keempat, UU no. 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air.

Lazismu yang merupakan lembaga amal zakat nasional terus berbenah dan mengembangkan diri. Pada saat ini telah terintegrasi 89 LazisMu cabang terdiri atas 23 propinsi, 78 kabupaten / kota dan

6 amal usaha. Capaian penghimpunan melalui rangkaian kegiatan amal juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 mencapai 5,9 M, dan pada tahun 2013 sebesar 8,4 M.

Aktivitas yang dilakukan oleh Persyarikatan sebagai Gerakan Islam Dakwah Amar Ma`ruf Nahi Munkar dan Tajdid memasuki hampir seluruh aspek kehidupan. Untuk lebih memperlancar dan meringankan pelaksanaan aktivitas tersebut, di samping untuk memperluas jaringan, Pimpinan Pusat telah membangun hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Sejak awal periode tahun 2010 sampai akhir periode tahun 2015, tidak kurang dari 17 (tujuh belas) kerjasama telah ditandatangani, baik langsung oleh Pimpinan Pusat maupun oleh Unsur Pembantu Pimpinan yang diketahui oleh Pimpinan Pusat. Bentuk kerjasama itu antara lain:

1. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 19 April 2011 di Yogyakarta. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Program & Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penguatan kapasitas Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi, penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pertukaran informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan kaidah-kaidah keislaman sebagai basis; penguatan kelembagaan gerakan lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penguatan dan pengembangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kaidah keislaman; dan penyelenggaraan gerakan nyata masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT Bank Syariah Bukopin pada 27 April 2011. Kerjasama ini

diadakan dalam rangka pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah meliputi Pemanfaatan jasa layanan pembiayaan; Pemanfaatan jasa pendanaan; Pemanfaatan Jasa Cash Management; Pemanfaatan gedung/kantor Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah untuk jaringan outlet layanan Bank Syariah; dan Pemanfaatan jasa layanan lainnya yang diperlukan.

3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kehutanan R.I. dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 15 Juni 2011. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara Kementerian Kehutanan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pelestarian Sumber daya Hutan, dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelestarian Sumber daya Hutan.
4. Kesepahaman Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Kerjasama di Bidang Hukum dan Pembinaan Pemasasyarakatan pada 11 Juli 2011 M di Jakarta. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka turut mewujudkan Negara hukum, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, melalui program-program yang disepakati
5. Kesepahaman Antara Mahkamah Konstitusi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengembangan Budaya Sadar Berkonstitusi Serta Penyebarluasan Informasi Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2011 di Palembang. Kerjasama ini diselenggarakan atas semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga serta dalam rangka membumikan konstitusi di Indonesia guna mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi. Kerjasama ini diarahkan untuk Membangun budaya sadar berkonstitusi, dan Menyebarluaskan gagasan

- dan merespons isu-isu di bidang hukum dan konstitusi; dan Meningkatkan pemahaman mengenai Mahkamah Konstitusi
6. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank Danamon Indonesia pada 15 Desember 2011. Ruang lingkup kerjasama ini adalah penggunaan jasa/layanan dan produk Bank yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usaha Muhammadiyah antara lain layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan.
 7. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank BRI Syariah pada 15 Desember 2011. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha Muhammadiyah baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan
 8. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank BNI Syariah pada 15 Desember 2011. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha Muhammadiyah baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan
 9. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank Syariah Mandiri pada 15 Desember 2011. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha Muhammadiyah baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup

- kerjasama tersebut meliputi layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan
10. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank Bank Tabungan Negara pada 15 Desember 2011. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha Muhammadiyah baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan
 11. Kerjasama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT. Bank Muamalat pada 15 Desember 2011. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha Muhammadiyah baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi layanan Cash Management; pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito; kerjasama usaha/bisnis yang saling menguntungkan
 12. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Persyarikatan Muhammadiyah Pada 11 April 2012. Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah; dan memberikan prioritas pelayanan dalam rangka mempercepat pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah
 13. Kesepahaman Bersama Antara pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik pada 16 November 2012 di Jakarta. Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara Muhammadiyah dan Arsip Nasional R.I dalam upaya penyelenggaraan kearsipan nasional. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi: pembinaan

sistem pengelolaan arsip; akuisisi arsip; preservasi arsip; akses arsip; dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati.

14. Perjanjian Kerja Sama Antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada 12 Februari 2013 di Yogyakarta. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara Muhammadiyah dan Arsip Nasional R.I. dalam upaya penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama Antara pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik pada 16 November 2012 di Jakarta.
15. Perjanjian Kerja sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 29 Juli 2013. Kerjasama ini diadakan dalam rangka mengupayakan percepatan pengendalian penduduk, keberhasilan Keluarga Berencana dan peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup kerja sama antara lain meliputi Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
16. Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Muhammadiyah pada 26 Agustus 2013 di Jakarta. Kesepahaman ini dibuat sebagai landasan dalam melaksanakan kerjasama sebagai upaya Pembinaan Sosial Keagamaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba; dan bertujuan untuk meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba
17. Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 23 Mei 2014 di Samarinda – Kalimantan Timur. Kesepahaman ini diadakan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Milik Muhammadiyah dan Sosialisasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyediakan pelayanan kesehatan

bagi peserta Jaminan Sosial Kesehatan melalui jaringan fasilitas pelayanan kesehatan milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Di samping kerjasama dalam lingkup nasional, Pimpinan Pusat juga membangun kerjasama dalam lingkup internasional. Langkah ini diambil karena sekarang dunia berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan yang bertendensi hendak memojokkan agama dan umat Islam dengan berbagai tipu dayanya. Dalam situasi seperti ini, Muhammadiyah terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju dan berkeadaban.

Peran Muhammadiyah di tingkat regional dan internasional juga semakin meningkat. Sejak Agustus 2011, Muhammadiyah resmi menjadi anggota United Nation Economic and Social Council (UN ECOSOC) atau Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (DES PBB). Eksistensi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan telah mendapatkan pengakuan internasional. Muhammadiyah juga menjadi salah satu anggota *International Contact Group* (ICG) yang dibentuk dalam rangka membantu penyelesaian konflik di Filipina Selatan, khususnya antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan pemerintah Filipina.

Muhammadiyah juga memberikan bea siswa kepada para mahasiswa muslim dari Thailand Selatan (Pattani) untuk menempuh studi di beberapa PTM. Beasiswa ini merupakan wujud komitmen Muhammadiyah dalam memperluas jejaring gerakan Muhammadiyah di wilayah Asia Tenggara dan meningkatkan kualitas muslim di Thailand. Selain itu, Muhammadiyah juga terus meningkatkan pendirian dan pengembangan Cabang Istimewa Muhammadiyah di luar negeri dan sister organization di berbagai negara sebagai jejaring yang memperkuat kerjasama dan peran strategis Muhammadiyah di dunia internasional.

Kantor Pimpinan Pusat, baik yang berada di Yogyakarta maupun Jakarta, selama periode ini banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan. Tidak kurang dari 50 Duta Besar Negara Sahabat dan Tokoh Internasional diterima oleh Pimpinan Pusat.

Di samping menerima kunjungan dari berbagai kalangan, anggota Pimpinan Pusat, terutama Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, banyak melakukan kunjungan ke luar negeri dan menghadiri berbagai macam forum dan acara Internasional diantaranya: H.R.H. The Chief Advisor to H.M. The King for Religious and Cultural Affairs and the Personal Envoy of H.M. The King at; Meeting of the Group of Strategic Vision (Russia-Islamic World); Conference on International Politics, Diplomacy and Religion, European University Institute, Florence, Italy; a high-level consultation at the Vatican on the moral dimensions of climate change and sustainable development; Dialogue between Muslims and Religious Leaders in Japan --in Pursuit of Shared Visions for Peace; H.R.H. The Chief Advisor to H.M. The King for Religious and Cultural Affairs and the Personal Envoy of H.M. The King:

VII. KEUANGAN

Berkaitan dengan keuangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010 – 2015 telah menerbitkan 3 Surat Keputusan, yakni Nomor 36/KEP/1.0/C/2012 tentang Sistem Pengelolaan Dana terpadu layanan Manajemen Kas; Nomor 37/KEP/1.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Sistem Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; Nomor 38/KEP/1.0C/2012 tentang Iuran Anggota, Infaq tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Tujuan Penerbitan ke tiga SK tersebut diatas, antara lain: a) mendorong agar persyarikatan dan seluruh AUM mulai memanfaatkan Bank Syariah, b) mengefektifkan dana yang dimiliki Persyarikatan dan AUM, c) menggalang dana di lingkungan Persyarikatan dan AUM.

Pelaksanaan Ketiga SK diatas dilaksanakan oleh TIM asistensi yang telah dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagaimana diketahui, di satu sisi hampir sebagian besar Pimpinan Persyarikatan di segala jenjang dan Amal Usaha Muhammadiyah masih memanfaatkan layanan bank konvensional, di sisi lain Bank Syariah telah berkembang pesat dengan pelayanan mencapai seluruh tanah air. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang perlu sudah saatnya Pimpinan Muhammadiyah di segala jenjang dan AUM untuk memanfaatkan layanan Bank Syariah. Layanan Bank Syariah yang dapat dimanfaatkan adalah untuk menyimpan dana dan mengambil kredit. Untuk layanan penyimpanan dana, sebagian besar Pimpinan Persyarikatan dan AUM telah memanfaatkan layanan penyimpanan di Bank Syariah Mitra Muhammadiyah. belum semua dana AUM dapat disimpan di Bank Syariah, karena situasi dan kondisi lokal yang dihadapi AUM, seperti adanya kerjasama dengan Pemda dan Bank Konvensional yang mesti dipatuhi. Sedangkan, belum semua AUM memanfaatkan layanan kredit dari Bank Syariah. Salah satu hambatan adalah, beaya peminjaman uang untuk pembangunan dari Bank Syariah tidak jarang lebih besar dibandingkan dengan beaya dari Bank Konvensional. Menghadapi kasus semacam ini, PP Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada AUM yang bersangkutan untuk menentukan. Namun, sepanjang beaya kredit Bank Syariah sama atau lebih kecil dari Bank Konvensional, PP Muhammadiyah mendorong agar AUM memanfaatkan layanan kredit Bank Syariah.

Selama ini Persyarikatan dan AUM terbiasa menyimpan uang dalam jumlah besar dalam bentuk giro. Hal ini sungguh tidak menguntungkan karena hasil giro amat kecil nyaris tidak ada artinya. dengan SK Pimpinan Pusat diatas, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan dan AUM diminta untuk memindahkan uang dari giro ke bentuk penyimpanan lain: tabungan atau deposito. Kebijakan ini sudah dijalankan oleh sebagian besar AUM. Giro hanya terbatas sebesar *cash flow* yang diperlukan.

Penggalangan dana internal Muhammadiyah amat diperlukan bagi gerak Persyarikatan baik masa kini dan terlebih-lebih di masa depan. Sekitar tiga tahun semenjak dikeluarkannya ketiga SK sebagaimana tersebut diatas, penggalangan dana dari kalangan warga, pimpinan dan amal usaha muhammadiyah belum sebagaimana yang diharapkan. Gagasan “potongan otomatis oleh bank” untuk infak dan iuran warga, pimpinan dan AUM belum berjalan. Namun, hal ini tidak boleh mengendorkan usaha kita dalam penggalangan dana, sebab sistem yang dikembangkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini bersifat amat modern dan merubah sistem yang selama ini telah dipegang dan dilaksanakan di kalangan persyarikatan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, perubahan sistem penggalangan dana ini memerlukan waktu lebih lama.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengembangkan sistem akuntansi dan telah dilaksanakan di workshop di tiga region oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. tiada lain kegiatan itu bertujuan untuk lebih menertibkan administrasi keuangan di lingkungan persyarikatan. Harus diakui, meski secara faktual fisik kondisi keuangan baik, namun hampir sebagian besar di kalangan persyarikatan, termasuk AUM, secara administratif keuangan belum sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang peningkatan kemampuan mengelola keuangan persyarikatan termasuk AUM perlu terus ditingkatkan.

Sampai kini belum dapat didokumentasikan dengan baik berapa besar aset persyarikatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, sudah berusaha keras untuk mengembangkan sistem data aset Muhammadiyah. salah satu penyebab adalah belum semua kekayaan persyarikatan tercatat dengan baik di semua jenjang persyarikatan. Namun, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan akan terus berusaha mengumpulkan data aset persyarikatan. Dalam kaitan dengan ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berinisiatif untuk memusatkan pengelolaan tiga tanah persyarikatan. Yakni, di NTT seluas 100 ha, di NTB seluas

75 ha dan di Sumbar seluas 100 ha. Dua bidang tanah pertama merupakan tanah wakaf, sedangkan sebidang tanah yang ketiga dibeli Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1947. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki rencana agar ketiga tanah tersebut dikelola secara ekonomis, artinya bidang tanah tidak hanya untuk kepentingan sosial, tetapi juga untuk kepentingan usaha yang bisa menghasilkan untuk membeayai gerak persyarikatan di segala jenjang.

Kemajuan suatu bangsa akan disertai tuntutan dari pemerintah memperluas cakupan penggalangan pajak. Saat ini, khususnya kalangan AUM sudah menjadi sasaran wajib pajak. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai bagian bangsa yang baik, mendorong AUM untuk mempersiapkan diri sehingga dapat memenuhi ketentuan pajak dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah didukung para ahli di bidang perpajakan, telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan dan workshop berkaitan dengan perpajakan ini. Sebab, kalau ketentuan pajak tidak diikuti dengan baik dan benar, akan menjadikan beban pajak besar dan memberatkan. Sebaliknya kalau ketentuan perpajakan dilaksanakan dengan baik dan benar maka beban pajak adalah normal atau biasa. Untuk bisa melaksanakan ketentuan dengan baik dan benar kalangan AUM perlu mempelajari dan memahami dengan baik ketentuan perpajakan tersebut. Oleh karena itu, di masa depan workshop perpajakan perlu dilaksanakan secara lebih luas dan merata ke seluruh AUM.

Memang Persyarikatan Muhammadiyah bukan lembaga bisnis yang kerjanya menghasilkan uang, tetapi Muhammadiyah untuk bisa bergerak perlu uang. Selama ini, dana untuk menggerakkan usaha-usaha Persyarikatan, terutama berasal dari sumbangan Amal Usaha Muhammadiyah. Alhamdulillah, berkat sumbangan khususnya, sampai saat ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam batas-batas tertentu, bisa membeayai semua majlis tingkat pusat. Sedangkan bagi Organisasi Otonom, Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru bisa memberikan bantuan yang terbatas.

Sesuai dengan amanat sidang tanwir di Samarinda, maka laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 telah disampaikan ke TIM Verifikasi yang dibentuk oleh sidang tanwir tersebut. Selanjutnya, TIM Verifikasi akan menyampaikan laporan hasil verifikasi keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah langsung ke Muktamar yang terhormat ini.

VIII. PROBLEMATIKA GERAKAN MUHAMMADIYAH

Di muka telah digambarkan secara rinci bagaimana kebijakan yang diambil oleh pimpinan pusat, khususnya tentang dinamika organisasi yang berlangsung dan lika-liku perjuangan/perjalanan Muhammadiyah selama lima tahun terakhir. Dari situ dapat dibaca rekam-jejak keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai. Namun demikian, pada saat bersamaan, kami menyadari belum semua permasalahan yang dihadapi bisa dirampungkan secara tuntas, sehingga sangat potensial memunculkan bibit-bibit problem baru. Problem-problem yang muncul ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi kepemimpinan Muhammadiyah berikutnya. Hal ini menunjukkan garis perjuangan Muhammadiyah secara berkelanjutan, sambung-menyambung bisa menjadi mata rantai perjuangan antar generasi.

Berikut ini adalah sketsa problematika gerakan Muhammadiyah yang mengemuka selama lima tahun terakhir. Sedikitnya ada sembilan titik genting dan mendasar yang berhasil diidentifikasi. Identifikasi problematika ini merupakan refleksi pengalaman selama lima tahun terakhir memimpin Muhammadiyah.

1. Dilema Sentralisasi-Desentralisasi pengelolaan Muhammadiyah.

Dengan pola sentralisasi, soliditas Muhammadiyah lebih terjaga dan bisa melakukan subsidi silang. Namun, sentralisasi mendorong semua masalah menumpuk di Pimpinan Pusat, sehingga laju Muhammadiyah melambat karena Pimpinan Pusat sarat beban atas tumpukan masalah dan atau pekerjaan.

Di sisi lain, pola desentralisasi memungkinkan laju gerakan

Muhammadiyah menjadi lebih lincah dan gesit menuju islam berkemajuan, namun mendorong terjadinya ketidaksolidan antar pimpinan cabang/daerah dan juga wilayah bahkan terjadi ego sektoral antar AUM dan Lembaga.

2. Kurang sinergi, menguatnya ego sektoral.

Distribusi tugas dan wewenang dalam Muhammadiyah baik secara vertikal (mulai dari tingkat ranting hingga pusat), maupun horizontal (melalui majelis dan lembaga) dimaksudkan untuk memudahkan kerja organisasi dan mengefektifkan koordinasi. Namun karena munculnya ego sektoral, distribusi kerja tersebut malah tumbuh menjadi arena “perebutan” kewenangan dan kepemilikan. Pimpinan dan warga Muhammadiyah belum secara luas menyadari bahwa kepemilikan kehartabendaan yang sesungguhnya adalah persyarikatan, bukan cabang, daerah maupun wilayah.

3. Sikap Intoleransi.

Sikap intoleransi (tidak toleran) masih mewarnai perilaku pimpinan Muhammadiyah, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih terjadi kecenderungan gerakan/pemikiran yang lebih kuat ke arah purifikasi, namun tidak sedikit pula yang bergerak lebih ke arah dinamisasi. Perbedaan kecenderungan gerakan/pemikiran ini potensial memunculkan sikap intoleran, yang menganggap bahwa hanya gerakan/pemikirannya sendiri yang paling Muhammadiyah.

Secara eksternal, sikap intoleran tersebut dipicu oleh perbedaan strategi berdakwah. Dakwah kepada orang-orang yang sudah **Muslim-Santri** tentu berbeda dengan cara berdakwah kepada kaum **Muslim-Abangan**. Perbedaan strategi ini bisa memicu sikap intoleransi secara diametral, yang berpangkal kepada klaim di mana masing-masing menganggap strateginya yang paling benar, dan menyatakan strategi lain yang berbeda itu sebagai salah.

4. Kualitas/kuantitas Dai masih jauh dari mencukupi.
Tanggungjawab Dai Muhammadiyah untuk mengurus hal-hal mendasar, seperti memakmurkan masjid-mushalla dan pengajian rutin masih terdapat kekurangan. Akibatnya, kegiatan pencerahan dan bimbingan masalah ibadah praktis di tingkat komunitas warga Muhammadiyah menjadi terbengkalai.
5. Publikasi Gerakan Muhammadiyah.
Publikasi dan pemberitaan media tentang kegiatan Muhammadiyah sangat kurang, tidak sebanding dengan jumlah gerakan dan penyebaran nilai yang dilakukan. Hal ini, di satu sisi karena daya kreativitas para penggerak Muhammadiyah kurang demonstratif menggoda media, dan di sisi lain, karena media memiliki “logika” tersendiri dalam meliput berita. Bisa jadi, masalah utamanya adalah kurangnya komunikasi dan silaturahmi pimpinan Muhammadiyah dengan beragam media yang ada.
6. Tata Kelola Organisasi.
Budaya tata kelola organisasi yang baik (*Good Governance*) belum melembaga di semua AUM dan Lembaga dalam Persyarikatan Muhammadiyah. *Good governance* mengharuskan adanya pertanggungjawaban, tidak hanya kepada warga dan Pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga kepada publik. Bentuk *Good governance* tersebut harus bisa dibaca/dimengerti dan diterima publik, bukan hanya diklaim sebagai sudah diterima di hadapan Allah SWT semata.
7. Kaderisasi Ulama Tarjih.
Kaderisasi ulama tarjih lewat lembaga pendidikan formal masih terbatas, baru ada satu PTUM. Diskursus keilmuan yang diajarkan pun masih terbatas pada masalah-masalah **Diniyah-Ketarjihan**, sehingga belum mampu menyentuh problematika kehidupan empirik **Muamalah-Duniawiyah** secara/yang luas.

8. Sosialisasi Dinamika Persyarikatan.

Sosialisasi produk-produk resmi persyarikatan seringkali tidak tepat sasaran, karena hanya berhenti di tingkat pimpinan dan tidak sampai kepada warga Muhammadiyah. Bahkan secara umum, produk-produk resmi persyarikatan menjadi milik dan disimpan di rumah anggota pimpinan sehingga tidak bisa diakses oleh warga Muhammadiyah secara meluas.

9. Pengikisan Ideologi Bermuhammadiyah.

Pengikisan ideologi di tingkat pimpinan persyarikatan dan jajaran pimpinan AUM terasa terjadi secara cepat. Motivasi menjadi bagian dari Muhammadiyah (bermuhammadiyah), secara massif terjadi bukan untuk menggembirakan dakwah Islam dan memajukan amal usahanya, tetapi malah menggerogoti dan melumpuhkan Persyarikatan dan AUM dari dalam baik karena tendensi kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan kepentingan memasukkan ideology lain untuk merampas AUM.

Di tengah dinamika gerak Persyarikatan yang terus berkiper meraih sukses, Muhammadiyah ditinggal oleh kader-kader penggerak yang penuh pengkhidmatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah hingga ke bawah. Secara khusus di tingkat pusat kader penggerak Muhammadiyah yang berdidikasi tinggi yaitu Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc dan Dr. (Hc) H. Said Tuhuleley, MM., untuk menyebut di antaranya, telah dipanggil Allah ke haribaan-Nya. Semoga keduanya dan juga para kader penggerak Persyarikatan lainnya yang telah dipanggil Allah kita do'akan husnul khatimah, diampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal sholehnya, serta menapat tempat di sisi Allah SWT.

Akhirnya, atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Persyarikatan, perorangan maupun kelembagaan, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik

moril maupun materil, sehingga memungkinkan Pimpinan Pusat dapat melaksanakan tugasnya memimpin Muhammadiyah dan memimpinkan pelaksanaan Keputusan Mukhtamar ke-46 serta Keputusan Tanwir 2012 dan 2014 dengan sebaik-baiknya. Semoga segala bantuan, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal sholeh yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Pimpinan Pusat menyadari bahwa dalam mengemban amanat untuk memimpin Persyarikatan, khususnya dalam memimpinkan pelaksanaan Keputusan Mukhtamar dan Tanwir, tentu terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu Pimpinan Pusat menyampaikan permohonan maaf. Semoga kinerja Pimpinan Pusat Periode 2015-2020 mendatang akan lebih baik lagi, sehingga mampu membawa Persyarikatan ke arah yang semakin baik dan maju. Suatu hal yang perlu disadari bahwa tantangan yang kita hadapi pada abad kedua Muhammadiyah tidak ringan dan sederhana, melainkan semakin bertambah berat dan kompleks. Hal ini memerlukan kerja keras yang dilandasi dengan keikhlasan, kekompakan, dan komitmen yang tinggi. Semoga Allah SWT meridhai dan memberkati langkah dan usaha kita. Amin

*Nashrun minallah wa fathun qarib,
Wssalamu`alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1436 H/ 1 Juli 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum, Sekretaris Umum,



Prof. DR. H. M Din Syamsuddin, M.A.



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2010-2015

I. PENDAHULUAN

Syukur Alhamdulillah berdasarkan hasil Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Samarinda tanggal 22-26 Mei 2014 tentang pembentukan Tim Verifikasi Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka telah di terbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 194/Kep/I.0/2014 tanggal 09 September 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015 yang terdiri dari :

1. N a m a : H. Sarno Hadi M. SE., Akt., CA.
Jabatan : Ketua Tim
Utusan : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
2. N a m a : Fityan Izza Noor Abidin. SE., MSA.
Jabatan : Anggota
Utusan : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
3. N a m a : Dede Haris Sumarno, SE
Jabatan : Anggota
Utusan : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta

Verifikasi dilaksanakan pada laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga dan Amal Usaha yang langsung dibawah pengelolaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun obyek Verifikasi sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta | 14. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan |
| 2. Kantor PP Muhammadiyah Jakarta | 15. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik |
| 3. Majelis Tarjih dan Tajdid | 16. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan |
| 4. Majelis Pendidikan Tinggi | 17. Lembaga Penanggulangan Bencana |
| 5. Majelis Pemberdayaan Masyarakat | 18. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga |
| 6. Majelis Lingkungan Hidup | 19. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting |
| 7. Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus | 20. AUM Muallimin |
| 8. Majelis Pendidikan Kader | 21. AUM Muallimat |
| 9. Majelis Pustaka dan Informasi | 22. BPH Muallimin & Muallimat |
| 10. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah | 23. AUM Majalah SM |
| 11. Majelis Pembina Kesehatan Umum | 24. AUM Toko SM |
| 12. Majelis Pelayanan Sosial | 25. AUM Gramasurya |
| 13. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan | 26. AUM TV Mu |

Verifikasi atas laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilaksanakan berdasarkan atas laporan keuangan yang telah disiapkan oleh Tim pembuat laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terdiri dari :

1. Nama : Jamaludin Joyoadikusumo, S.ET.
Alamat : Sanggrahan GKIV/117 Rt.47 Rw.13 Baciro Yogyakarta
2. Nama : Ahim Abdurahim, SE., M.Si., Ak., SAS., CA.
Alamat : Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta

Kemudian Tim Verifikasi mengkonfermasi dengan data riil laporan keuangan di obyek Verifikasi. (*Tim Verifikasi bukan mengaudit laporan keuangan*)

II. HASIL VERIFIKASI

Verifikasi dilaksanakan oleh Tim dengan motede pengamatan laporan keuangan, observasi obyek verifikasi, observasi dokumen-dokumen keuangan pada obyek verifikasi serta wawancara terhadap pimpinan ataupun staff yang berada pada obyek verifikasi.

Adapun beberapa dokumen penunjang obyek Verifikasi diantaranya :

1. Laporan Keuangan :
 - a. Arus Kas
 - b. Buku Besar
 - c. Laba/Rugi
 - d. Neraca
2. Bukti Transaksi
3. Rekening Koran
4. Buku Tabungan
5. Bilyet dan Surat Saham
6. Sertifikat
7. BPKB
8. Daftar Piutang
9. Cash Opname
10. Daftar Inventaris Barang

Dari Verifikasi yang dilakukan maka terdapat koreksi-koreksi atas Laporan Keuangan, kemudian menghasilkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas PP Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015 sebagai berikut :

LAPORAN POSISI KEUANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Per 31 DESEMBER 2014

Aset			
Kas dan Setara Kas	Rp.	25.033.331.546,-	
Piutang	Rp.	28.516.993.927,-	
Persediaan dan Biaya Dibayar Dimuka	Rp.	6.066.421.993,-	
Investasi	Rp.	27.631.036.190,-	
Aset Tetap	Rp.	190.997.242.873,-	
Jumlah Aset	Rp.	278.245.026.529,-	
Liabilitas dan Aset Neto			
Utang dagang	Rp.	29.529.935.716,-	
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	163.099.450,-	
Utang Lain-lain	Rp.	6.130.627.268,-	
Utang Jangka Panjang	Rp.	268.269.337,-	
Jumlah Liabilitas	Rp.	36.091.931.771,-	
Aset Netto			
Tidak Terikat	Rp.	278.245.026.529,-	
Terikat Temporer	Rp.	0,-	
Terikat Permanen	Rp.	0,-	
Jumlah Aset Netto	Rp.	278.245.026.529,-	

Sumber : Neraca gabungan (Kantor PP Muh, Majelis, Lembaga dan AUM dibawah pengelolaan PP Muh) yang sudah di Adjusmen (Penyesuaian).

**LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

PERIODE : 31 DESEMBER 2014

Perubahan Aset Netto Tidak Terikat

Pendapatan dan Penghasilan	Rp. 131.653.975.786 ,-
Sumbangan	Rp. 31.405.372.044,-
Jasa Layanan	Rp. <u>56.222.797.902,-</u>
Jumlah penghasilan Tidak terikat	Rp. 219.282.145.732,-
Beban dan Kerugian	
Biaya Kantor	Rp. 50.350.101.961,-
Biaya Operasional Kegiatan Organisasi	Rp. 20.523.050.336,-
Biaya kegiatan majelis dan lembaga	Rp. 26.807.949.029,-
Penyusutan	Rp. 6.151.129.110,-
Biaya operasional Lainnya	Rp. <u>47.826.811.339,-</u>
Jumlah Beban	Rp. 151.654.041.775,-
Kenaikan Jumlah Aset Netto tidak terikat	Rp. 67.628.103.957,-
Perubahan Aset Netto Terikat Temporer	Rp. 0,-
Perubahan Aset Netto Terikat Permanen	Rp. <u>0,-</u>
Kenaikan Aset netto	Rp. 67.628.103.957,-
Aset Netto Pada Awal tahun	Rp. <u>210.616.922.571,-</u>
Aset Netto Pada Akhir Tahun	Rp. 278.245.026.529,-

Sumber : Neraca gabungan (Kantor PP Muh, Majelis, Lembaga dan AUM dibawah pengelolaan PP Muh) yang sudah di Adjusmen (Penyesuaian).

III. REKOMENDASI

Dari verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi, maka dapat disimpulkan beberapa rekomendasi diantaranya :

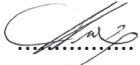
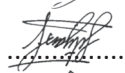

1. Perlu distandarisasi laporan keuangan Kantor PP, Majelis, Lembaga, AUM yang sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku umum (IFRS atau SAK Etap) dan koidah pengelolaan keuangan perserikatan Muhammadiyah.
2. Perlu kepastian sistem pendapatan Majelis dan Lembaga menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi keuangan sebagai pedoman dalam pengendalian kekayaan perserikatan.
3. Optimalisasi Rencana Pendapatan dan Belanja Organisasi untuk efektivitas pencapaian sasaran program organisasi.
4. Perlu dilakukan pelatihan SDM dalam bidang keuangan dan akuntansi secara berkala dan berkelanjutan untuk seluruh tenaga keuangan di lingkungan PP Muhammadiyah.
5. Verifikasi keuangan hendaknya dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Verifikasi atas Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 ini kami buat. Semoga dari hasil yang kami sampaikan dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan yang ada di Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Khususnya dan Muhammadiyah secara keseluruhan pada Umumnya.

Atas segala kekurangan hasil dari Verifikasi ini, kami memohon maaf yang tak terhingga dan terima kasih.

Tim Verifikasi Laporan Keuangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015

1. Ketua **H. Sarno Hadi M. SE., Akt., CA.** 
2. Anggota **Fityan Izza Noor Abidin. SE., MSA.** 
3. Anggota **Dede Haris Sumarno, SE** 

Jakarta, 16 Juni 2015

K e p a d a
Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
di T e m p a t

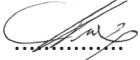
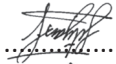
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Dengan surat ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan Verifikasi Laporan Keuangan PP Muhammadiyah masa jabatan 2010-2015 telah selesai dilaksanakan. Oleh karena sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Verifikasi kami serahkan Laporan Hasil Verifikasi Laporan Keuangan PP Muhammadiyah masa jabatan 2010-2015 sebagaimana terlampir

Demikian laporan dari kami, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Tim Verifikasi Laporan Keuangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015

1. Ketua **H. Sarno Hadi M. SE., Akt., CA.** 
2. Anggota **Fityan Izza Noor Abidin. SE., MSA.** 
3. Anggota **Dede Haris Sumarno, SE** 